

STRATEGI INDONESIA MEMANFAATKAN RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK DI KAWASAN PASIFIK

Zulaekha Amalia¹⁾

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.

¹zulaekhaamalia@gmail.com

Abstrak

This article aimed to investigate Indonesia's strategy in facing the rivalry between United States (US) and China in the Pacific region. The rise of China's power and US's rebalance show us the balance of power that affected Indonesia. Based on this, through this article the author will illustrate the Indonesia's strategy by explaining Indonesia's relations with the United States and China. This article uses the concept of Indonesia's national interests which is implemented through the Dynamic Equilibrium approach to analyse Indonesia's relations with the two main axis countries in the Asia Pacific region. The method that used in this article is the qualitative approach that study related literature to national interests and Dynamic Equilibrium which form the analytical framework. Through data exploration, the author found the influence of the United States and China on Indonesia in the political, security, and economic aspects that result Indonesia's Free and Active foreign policy.

Keywords: *Indonesia, United States, China, National Interest, Dynamic Equilibrium*

Pendahuluan

Kawasan Asia Pasifik merupakan wilayah persaingan strategis yang berperan penting dalam percaturan politik global. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan tersebut meningkatkan kontestasi geopolitik yang memberikan momentum bagi negara lain untuk meningkatkan pertumbuhan negaranya. Sebagai contohnya,

negara-negara di Asia Tenggara yang merupakan jantung di kawasan Pasifik. Berdasarkan letak geografis, kawasan Asia Tenggara menjadi jalur perdagangan strategis, ditunjukkan oleh *Sea Line of Communications* (SLOCs) yang membawa hasil perdagangan dan memberikan keuntungan bagi negara-negara tersebut (Sundararaman, 2018). Selain dari segi geografis, negara-negara di Asia Tenggara memiliki keunggulan dalam hal sumber daya alam melimpah dan pertumbuhan ekonomi yang baik, seperti halnya Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara besar di Asia Tenggara merupakan negara berkembang yang berada dalam proses pembangunan, baik dari segi infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Hal ini menciptakan peluang bagi negara-negara besar untuk ikut andil dalam pembangunan dan pengembangan di negara tersebut.

Keterlibatan negara-negara besar disebabkan oleh belum mampunya Indonesia dalam memenuhi dan mengolah kebutuhannya secara mandiri. Walaupun memiliki faktor-faktor kelebihan yang mendukung, tetapi negara ini masih belum dapat menyaingi negara-negara besar di kawasan Pasifik. Atas dasar urgensi terkait dengan kepentingan domestiknya, mengharuskan Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan negara yang memiliki *resources* lebih, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Oleh sebab itu, fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut yang bertujuan untuk mengetahui **bagaimana strategi Indonesia dalam memanfaatkan rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Pasifik.**

Membahas terkait persaingan di kawasan Pasifik identik dikaitkan dengan kompetisi antara negara *great power* di dalamnya. Odgaard (2007) menyatakan hanya dua kekuatan yang memenuhi syarat menjadi poros utama di kawasan Pasifik, yaitu Tiongkok karena kekuatan perekonomiannya dan Amerika Serikat dari segi kapabilitas militernya. Tidak dapat dipungkiri, kebangkitan Tiongkok serta upaya *rebalance* Amerika Serikat di kawasan tersebut membawa pengaruh bagi negara-negara lain untuk melindungi dan memperkuat negaranya.

Akan tetapi, negara-negara *middle power* patut menjadi sorotan dan

dipertimbangkan posisinya, terutama negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Goh (2008) mengutarakan perdebatan para ahli terkait anomali Pasifik dengan pertanyaan besar mengenai pola hubungan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dianggap berusaha untuk *balancing*, *bandwagoning*, dan bermain di bawah kepentingan negara-negara *great power*. Lingkungan kompetitif memberikan peluang negara-negara Asia Tenggara meningkatkan taruhan *vis-à-vis* dan status internasional. Asumsi dini mengatakan adanya kecenderungan negara-negara tersebut untuk memanfaatkan rivalitas yang terjadi.

Secara umum, pemikiran strategis kawasan didasari oleh dua prinsip dasar, yaitu ketidakpastian dan diversifikasi (Gill, Goh, & Huang, 2016). Prinsip ketidakpastian mengatakan negara-negara (berkekuatan relatif kecil hingga sedang) akan memanifestasikan kepentingan kolektif mereka terhadap aktor yang lebih besar. Dalam hal ini, negara-negara Asia Tenggara peka terhadap peran penting Amerika Serikat dalam keamanan regional untuk mengantisipasi perkembangan kekuatan Tiongkok. Sementara itu, prinsip diversifikasi digambarkan melalui kondisi negara-negara di Asia Tenggara yang tidak dapat menghindari ambisi kekuatan negara besar, tetapi dapat berupaya untuk mendiversifikasi ketergantungan ekonomi dan strategis mereka dengan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

Berdasarkan uraian terkait prinsip strategis kawasan, artikel ini berfokus terhadap posisi negara-negara di Asia Tenggara yang bias, salah satunya adalah Indonesia. Sebagai salah satu negara besar di Asia Tenggara, Indonesia acap kali disebut sebagai negara berkaki dua karena memanfaatkan hubungan rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia melihat perdagangan global yang melalui lintas maritim Indonesia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia sebagai peluang menjadi “tumpuan maritim global” untuk meningkatkan akses ke pasar utama dan mendapatkan berbagai barang dari kombinasi kekuatan dua negara adidaya (Hamilton-Hart & McRae, 2015). Oleh sebab itu, pada pembahasan selanjutnya, artikel ini akan membahas konsep yang menjadi dasar pemikiran dalam pembahasan

terkait dengan strategi Indonesia menghadapi persaingan kedua negara *great power* tersebut.

Kerangka Analisis

Indonesia saat ini berada dalam persimpangan dua polarisasi utama. Amerika Serikat sebagai negara *superpower* dan Tiongkok yang merupakan *new emerging power* telah melibatkan Indonesia ke dalam strategi politik untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Pembahasan terkait kepentingan nasional merupakan hal yang mengakar dalam literatur studi Hubungan Internasional. Merujuk kembali terhadap pemikiran tradisional, seorang tokoh realis, H. J. Morgenthau dalam karyanya *Politics Among Nations* meyakini bahwa kepentingan yang seringkali didefinisikan sebagai kekuasaan merupakan penentu arah hubungan antarnegara (Hadiwinata, 2017). Hal ini selanjutnya mendasari salah satu konsep pemikiran realisme terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara berasal dari kepentingan nasional negara tersebut.

Terdapat argumentasi lainnya yang menambahkan, kepentingan nasional secara normatif merupakan tujuan yang dicita-citakan oleh suatu negara yang dapat dicapai melalui hubungannya bersama dengan negara lain (Codevilla & Seabury, 2006). Pandangan definitif tersebut mengarahkan kepentingan nasional yang dilakukan dengan menjalin hubungan bersama dengan negara lain. Nuechterlein (1976) mengungkapkan pendapat para ahli terkait garis besar kepentingan nasional yang dibagi menjadi empat dimensi utama, yaitu dimensi pertahanan, ekonomi, tata dunia, dan ideologis.

Penggunaan diksi “rivalitas” antara Amerika Serikat dan Tiongkok menghasilkan makna ambigu bagi Indonesia. Satu sisi rivalitas melahirkan kompetisi, sementara di sisi lain dapat menghasilkan kooperasi. Kunci utama dalam sebuah strategi adalah dengan memilih jenis kemampuan yang dapat dikembangkan, memerhatikan keterbatasan sumber daya, dan memaksimalkan pengaruh internasional (Goldstein & Pevehouse, 2014). Oleh sebab itu, untuk melancarkan kepentingan nasionalnya, Indonesia memanfaatkan rivalitas tersebut dengan memilih strategi kerja sama dan melibatkan dua negara besar yang tengah bersaing.

Strategi kerja sama Indonesia dilakukan dengan tinjauan situasi yang dapat dimanfaatkan melalui sebuah konsepsi yang disebut *Dynamic Equilibrium*. Perspektif *Dynamic Equilibrium* merupakan pandangan alternatif yang menggambarkan strategi keselarasan kerja sama antarnegara dengan prinsip tidak memihak sehingga tidak ada kekuatan yang mendominasi dalam hubungan tersebut (Poling, 2013). Konsep *Dynamic Equilibrium* menjadi pendekatan yang dilakukan Indonesia untuk mengamankan kepentingan nasionalnya melalui hubungan kerja sama dengan dua negara *great power* di kawasan Pasifik.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan studi literatur yang bersifat kualitatif. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen negara, dan sumber digital. Pengumpulan data tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Menurut Creswell (2014), metode deduktif merupakan suatu metode analisis yang berangkat dari teori atau konsep dan kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi. Dalam artikel ini, konsep kepentingan nasional dan *Dynamic Equilibrium* merupakan konsep relevan yang dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir analisis.

Hasil analisis data dari studi literatur dan pembahasan merupakan indikator utama perumusan masalah yang menjadi kesimpulan dalam fenomena tersebut. Artikel ini memfokuskan penelitian terhadap kajian terkait Indonesia dari aspek politik, keamanan, dan perekonomian dalam rentan waktu sepuluh tahun terakhir. Lingkup waktu tersebut diangkat sebagai fokus waktu penelitian untuk memudahkan analisis permasalahan. Selain itu, konsep *Dynamic Equilibrium* menjadi sorotan yang hangat dibicarakan pada fenomena politik Indonesia dalam kurun waktu tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian pembahasan, artikel ini akan menyuguhkan analisis terkait kepentingan nasional Indonesia yang diimplementasikan melalui konsep *Dynamic Equilibrium*. Analisis data dapat dilihat melalui sudut pandang hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Secara spesifik hubungan antara Indonesia dengan kedua negara tersebut dapat diilustrasikan melalui uraian berikut ini.

A. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat

Indonesia merupakan wilayah strategis yang mendorong kepentingan dan menjadi arena rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam persaingan memperebutkan pengaruh Indonesia, Amerika Serikat melancarkan kepentingannya dengan meningkatkan kerja sama ekonomi dan pembangunan, diplomasi, serta militer dan keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan Amerika Serikat telah memfokuskan terhadap hubungan geopolitik, berperan aktif membantu Indonesia memerangi terorisme, mempromosikan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, serta memajukan kepentingan perdagangan dan investasi Amerika Serikat di Indonesia (Vaughn, 2011). Untuk memperdalam hubungan antara kedua negara tersebut, artikel ini selanjutnya akan membagi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat ke dalam beberapa aspek.

1. Ekonomi dan Pembangunan

Dalam aspek ekonomi, Amerika Serikat menyoroti pentingnya perdagangan dan investasi yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian. Amerika Serikat merupakan mitra dagang dan investasi yang penting bagi Indonesia (Vaughn, 2011). Dari aspek perdagangan, berdasarkan data neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat periode 2015-2019, sektor non-migas merupakan sektor unggulan ekspor dan impor perdagangan (Kemendag, 2020). Untuk melihat aktivitas perdagangan secara rinci, berikut

adalah tabel data hubungan ekspor dan impor Amerika Serikat dan Indonesia periode 2015-2019.

Tabel 1. Peringkat Ekspor Non-Migas (Negara Tujuan Utama) Periode 2015-2019 (in Billion USD)

| No | Negara | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Tiongkok | 13.26 | 15.12 | 21.35 | 24.41 | 25.85 | 99.99 |
| 2 | Amerika Serikat | 15.31 | 15.69 | 17.13 | 17.67 | 17.68 | 83.48 |
| 3 | Jepang | 13.10 | 13.21 | 14.69 | 16.31 | 13.75 | 71.06 |
| 4 | India | 11.60 | 9.93 | 13.95 | 13.67 | 11.66 | 60.82 |
| 5 | Singapura | 8.66 | 9.34 | 9.09 | 9.00 | 9.07 | 45.17 |

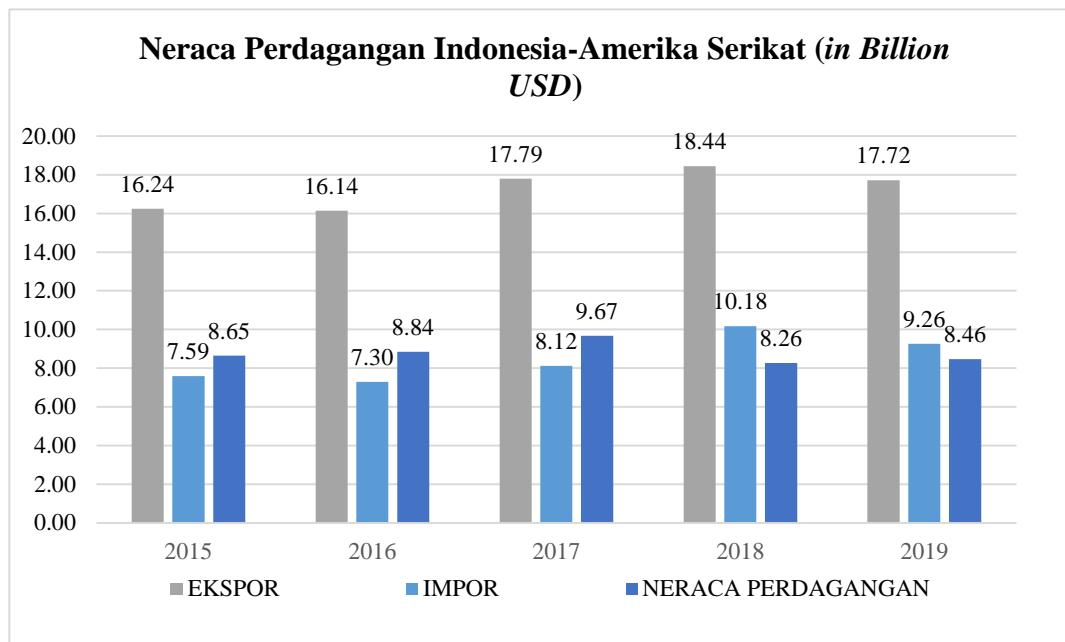
Sumber: Kemendag, 2020

Tabel 2. Peringkat Impor Non-Migas (Negara Asal Utama) Periode 2015-2019 (in Billion USD)

| No | Negara | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1 | Tiongkok | 29.22 | 30.69 | 35.51 | 45.25 | 44.58 | 185.26 |
| 2 | Jepang | 13.23 | 12.93 | 15.21 | 17.94 | 15.59 | 74.90 |
| 3 | Thailand | 8.02 | 8.60 | 9.19 | 10.85 | 9.41 | 46.08 |
| 4 | Singapura | 8.98 | 7.66 | 8.28 | 9.58 | 9.19 | 43.69 |
| 5 | Amerika Serikat | 7.55 | 7.21 | 7.70 | 9.11 | 8.10 | 39.66 |

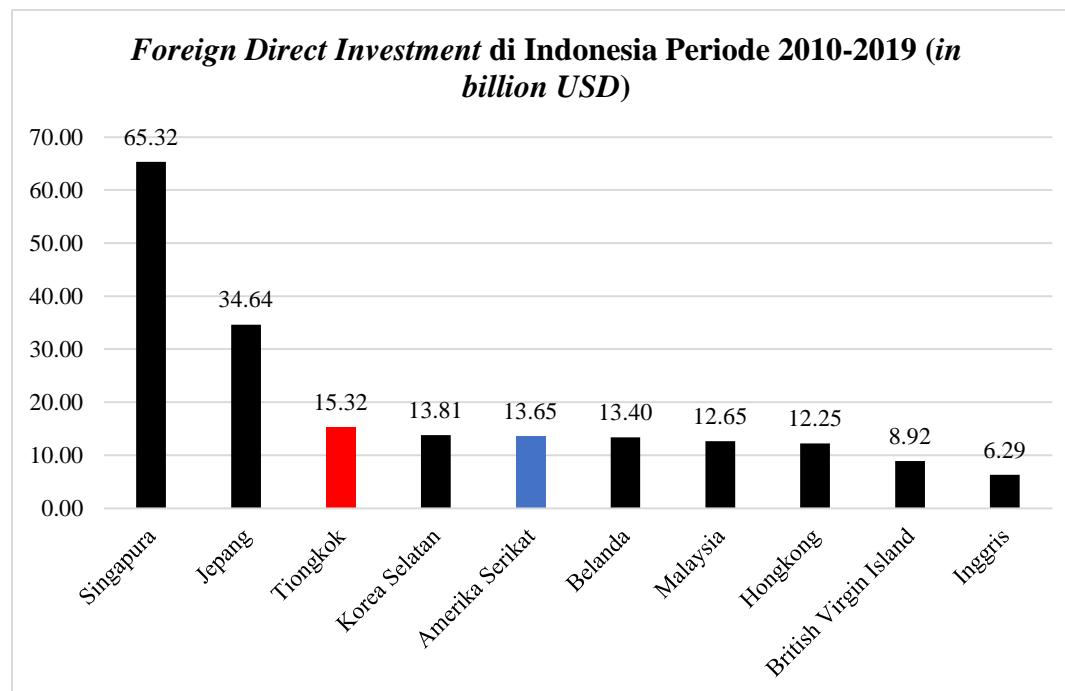
Sumber: Kemendag, 2020

Pada Tabel 1 Amerika Serikat tercatat menjadi negara tujuan ekspor non-migas terbesar kedua setelah Tiongkok, dengan jumlah total US\$ 83,48 miliar pada periode 2015-2019. Komoditas yang menjadi sasaran utama ekspor non-migas ke Amerika Serikat ialah pakaian dan aksesoris pakaian bukan rajutan. Adapun dalam perkembangan impor non-migas, Tabel 2 menunjukkan Amerika Serikat menduduki posisi kelima dengan nilai total US\$ 39,66 miliar pada periode 2015-2019. Komoditas barang yang menjadi sasaran impor Amerika Serikat adalah minyak biji-bijian, buah beraroma, dan aneka biji-bijian. Berdasarkan uraian tersebut, pola hubungan dagang Amerika Serikat dan Indonesia dari periode 2015-2019 selalu menghasilkan surplus yang ditunjukkan oleh Gambar 1.



Gambar 1. Neraca Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat (in Billion USD)

Sumber: Kemendag, 2020



Gambar 2. Foreign Direct Investment di Indonesia Periode 2010-2019

Sumber: BKPM, 2020

Dari segi investasi, berdasarkan Gambar 2, dalam periode 2010-2019 Amerika Serikat tercatat merealisasikan investasi secara langsung oleh luar negeri sebesar US\$ 13,65 miliar atau menempati urutan kelima sebagai negara dengan jumlah *Foreign Direct Investment* (FDI) terbesar di Indonesia. Sektor yang menduduki posisi utama FDI Amerika Serikat di Indonesia adalah sektor pertambangan (sebanyak 141 proyek dari total 3349 proyek) dengan nilai investasi mencapai US\$ 11,99 miliar (dari total nilai investasi US\$ 13,65 miliar) pada periode 2010-2019 (BKPM, 2020).

Pada aspek pembangunan, kerja sama bilateral ditunjukkan dengan peran aktif *The U.S. Agency for International Development* (USAID) dan *Millennium Challenge Corporation* (MCC) bersama dengan pemerintahan Indonesia. *US Department of State* (2020) mencatat, USAID telah memberikan program bantuan untuk mengatasi krisis pembangunan berbasis sumber daya alam yang mengancam ketahanan pangan global. Sementara itu, MCC memiliki peranan penting lain yang diwujudkan melalui dana bersama sebesar US\$ 474 juta yang dikembangkan untuk memajukan energi terbarukan, meningkatkan nutrisi untuk mengurangi pertumbuhan yang terhambat, dan modernisasi sistem pengadaan publik Indonesia.

2. Diplomasi

Indonesia bersama dengan Amerika Serikat telah meresmikan *Comprehensive Partnership Agreement* sejak November 2010 (Gill, Goh, & Huang, 2016). Hubungan Kemitraan Komprehensif yang selanjutnya menjadi Hubungan Kemitraan Strategis, ditujukan sebagai upaya untuk membingkai struktur hubungan, prioritas, dan target sehingga hubungan negara dapat lebih terukur dan terprediksikan (Hamilton-Hart & McRae, 2015). Indonesia memanfaatkan hal tersebut sebagai penguatan perannya dalam ranah global dan mengikat Amerika Serikat yang mampu berkontribusi pada keamanan regional.

Hubungan diplomasi antara kedua negara tersebut juga didukung oleh sambutan hangat Indonesia terhadap upaya *rebalance* Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Indonesia menilai hadirnya Amerika Serikat melalui strategi Indo-Pasifik adalah hal yang diperlukan untuk meningkatkan stabilitas dan menjaga perimbangan kekuatan di Asia. Hubungan diplomasi Amerika Serikat dan Indonesia semakin diperkuat dengan kerja sama kedua negara dalam mengatasi permasalahan regional dan global yang menyangkut perlawanan terhadap ekstremisme, kontraterorisme, operasi pemeliharaan perdamaian global, keamanan maritim, dan pandemi kesehatan (*US Department of State*, 2020).

3. Militer dan Keamanan

Dalam aspek militer dan keamanan, Indonesia dan Amerika Serikat berbagi kepentingan bersama untuk meningkatkan pemeliharaan perdamaian, bantuan bencana, kontraterorisme, dan penyeimbangan kekuatan Tiongkok. Indonesia telah berpartisipasi dalam *United Nations Peacekeeping Operations* (UNPKOs) yang didukung oleh Amerika Serikat melalui *Global Peace Operations Initiative* (GPOI). Dukungan Amerika Serikat ditunjukkan oleh program kegiatan pelatihan militer perdamaian, bantuan kemanusiaan dan bencana, serta pengembangan kapasitas militer Indonesia (Murphy, 2010). Di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat melalui USPACOM (*United States Pacific Command*) telah melakukan 200 pelatihan militer bersama yang diikuti oleh 300 personel TNI setiap tahunnya (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016).

Selain itu, kekuatan geostrategis Indonesia telah membuka peluang terhadap kerja sama maritim dengan negara lain. Pada tanggal 24 Oktober 2015, Indonesia bersama dengan Amerika Serikat telah menandatangani

perjanjian kerja sama maritim terkait bantuan substansial Amerika Serikat yang mendukung pembangunan berkelanjutan sektor maritim (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2015). Amerika Serikat juga memberikan dukungan terhadap Indonesia terkait kasus sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan yang bersinggungan dengan wilayah teritorial Indonesia, yaitu Pulau Natuna yang memiliki kekayaan sumber daya minyak dan gas.

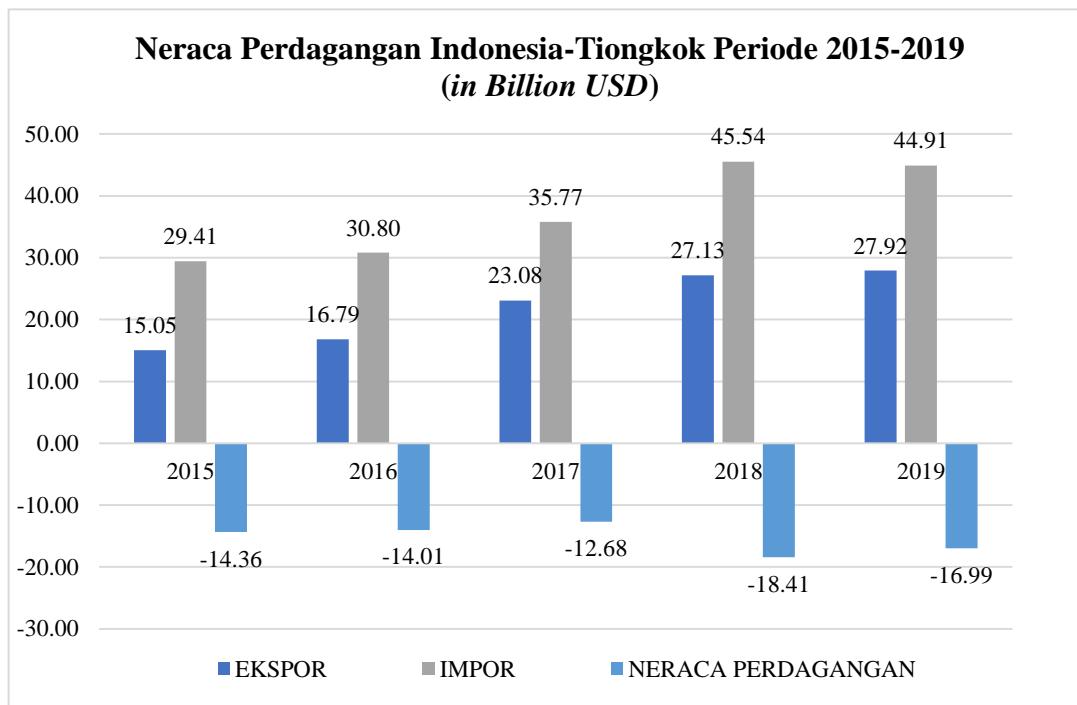
B. Hubungan Indonesia dengan Tiongkok

Dalam beberapa dekade terakhir, percaturan politik di kawasan Pasifik diwarnai oleh kebangkitan Tiongkok dari aspek politik, ekonomi, dan militer. Dinamika politik yang terjadi memberikan peluang dan tantangan kompleks bagi Indonesia. Tiongkok sebagai negara yang berpotensi menjadi hegemoni di kawasan tersebut memiliki pengaruh yang besar bagi kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan tersebut dimanfaatkan oleh Tiongkok sebagai upaya untuk meraih tujuan strategisnya sebagai poros utama di Asia. Hal tersebut dirangkum dalam tiga aspek besar, yaitu melalui hubungan ekonomi dan pembangunan, militer dan keamanan, serta diplomasi.

1. Ekonomi dan Pembangunan

Dalam aspek perekonomian, hubungan Tiongkok dengan Indonesia dapat dilihat melalui hubungan perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia dengan keunggulan dalam sektor perdagangan non-migas. Sebagai mitra strategis, sejak periode 2015-2019, Tiongkok menduduki negara di posisi pertama dalam ekspor Indonesia dengan jumlah total US\$ 99,99 miliar dan impor dengan jumlah total US\$ 185,26 miliar (Tabel 1 dan 2). Komoditas utama ekspor Indonesia berupa bahan bakar mineral sedangkan komoditas

utama yang diimpor Tiongkok ialah barang-barang elektronik. Hal ini sejalan dengan besarnya minat masyarakat Indonesia terhadap alat-alat elektronik yang diproduksi oleh Tiongkok. Pola perdagangan tersebut selanjutnya dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.



Gambar 3. Neraca Perdagangan Indonesia-Tiongkok (in Billion USD)

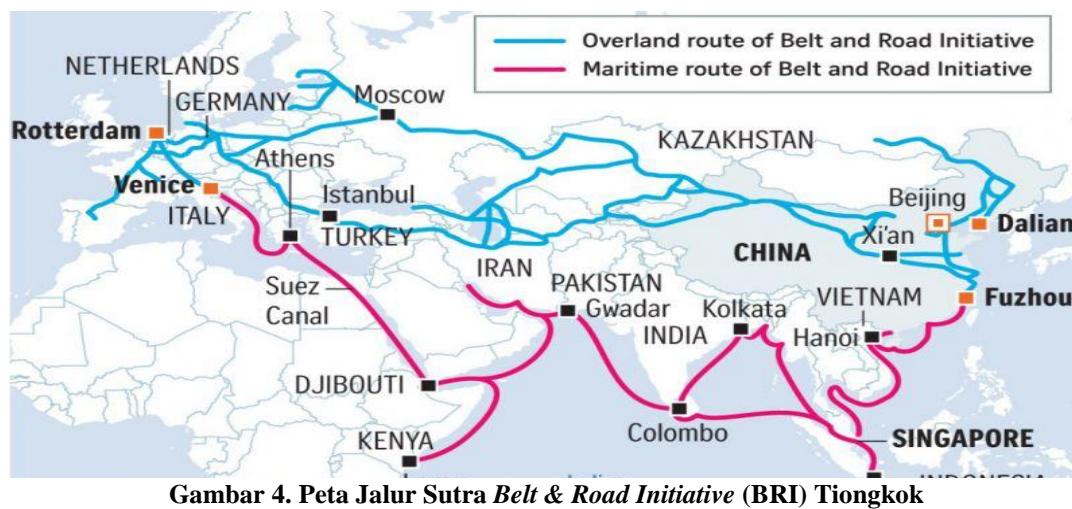
Sumber: Kemendag, 2020

Berdasarkan Gambar 3, sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Indonesia selalu mengalami defisit perdagangan terhadap Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai impor yang jauh mengungguli nilai ekspor Indonesia terhadap Tiongkok. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan melemahnya kinerja ekspor Indonesia disebabkan oleh faktor sensitivitas terhadap isu-isu non-ekonomi. Selain itu, peneliti *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menambahkan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok adalah salah satu penyebab dari menurunnya nilai ekspor di Indonesia (Friana, 2018).

Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dunia tidak hanya berdampak penting bagi perdagangan Indonesia, melainkan juga dari segi investasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Tiongkok tercatat menduduki posisi ketiga terbesar dalam realisasi investasi secara langsung oleh luar negeri dengan nilai mencapai US\$ 15,32

miliar (Gambar 2). Adapun peringkat realisasi investasi Tiongkok terhadap Indonesia berdasarkan sektor, didominasi oleh sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang mencapai 769 proyek (dari total 9309 proyek) dengan nilai investasi sebesar US\$ 5,8 miliar selama periode 2010-2019 (BKPM, 2020).

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu cirinya ditunjukkan oleh maraknya pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Tiongkok dengan ambisi proyek *Belt & Road Initiative* (BRI) memanfaatkan hal tersebut dengan memberikan bantuan dana investasi proyek infrastruktur kepada Indonesia yang diwujudkan melalui program kereta api cepat Jakarta-Bandung, pembangunan jalan tol, dan proyek Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU) di sejumlah daerah (Andika & Aisyah, 2017). Kerja sama proyek infrastruktur menjadikan Indonesia semakin terikat oleh Tiongkok yang kemudian dimanfaatkan Tiongkok sebagai penguatan jalur sutra dalam proyek



Gambar 4. Peta Jalur Sutra Belt & Road Initiative (BRI) Tiongkok

Sumber: Asia Green, 2020

BRI-nya.

2. Militer dan Keamanan

Tiongkok memberikan peluang bagi Indonesia untuk melakukan

modernisasi kekuatan militer di tengah kontestasi geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga keseimbangan militer dan meningkatkan stabilitas keamanan kawasan. Pada tahun 2013, Indonesia di bawah Menteri Pertahanan Indonesia, Purnomo Yusgiantoro bersama dengan Tiongkok menyepakati Kemitraan Strategis Komprehensif yang mencakup peningkatan kerja sama militer dan pertahanan (Hamilton-Hart & McRae, 2015). Kerja sama tersebut meliputi pelatihan gabungan, pengadaan peralatan senjata, peningkatan kapabilitas pasukan TNI Angkatan Udara, Darat, dan Laut Indonesia bersama dengan PLA. Selain itu, melalui Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015), kebutuhan Indonesia terhadap Tiongkok dari segi militer dan keamanan mencakup kepentingan dalam masalah pertahanan, riset dan teknologi, serta pengembangan dan pemasaran peralatan militer yang ditujukan untuk mengamankan wilayah dan kepentingan nasional Indonesia.

3. Diplomasi

Hubungan kerja sama militer Indonesia dengan Tiongkok tidak berjalan mulus begitu saja, Terjadinya konfrontasi sengketa Laut Tiongkok Selatan menciptakan tensi hubungan diplomasi di antara kedua negara. Akibat dari hal tersebut, pada tahun 2016, Angkatan Laut Indonesia sempat menolak ajakan kerja sama PLA terkait pelatihan bersama dengan negara anggota ASEAN di Laut Tiongkok Selatan (Goh, Gill, & Huang, 2016). Selain itu, Indonesia pada era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah melakukan penenggelaman kapal-kapal Tiongkok sebagai upaya penertiban kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia hingga sempat kian memperburuk hubungan diplomasi Indonesia dengan Tiongkok.

Akan tetapi secara garis besar, hubungan diplomasi Indonesia dengan Tiongkok pada era Presiden Joko Widodo mengalami penguatan. Meskipun

diiringi dengan isu kedaulatan teritorial, tetapi di sisi lain, pengaruh Tiongkok di bidang ekonomi memengaruhi pola hubungan kedua negara semakin kooperatif. Meningkatnya hubungan kerja sama Indonesia dan Tiongkok dapat dilihat dari banyaknya jumlah nota kesepahaman yang disepakati bersama, yaitu mencapai 36 MoU dalam waktu yang relatif singkat (Andika & Aisyah, 2017). Hal ini membuktikan politik luar negeri era Presiden Jokowi juga telah membuka pintu besar terhadap dukungannya kepada Tiongkok yang ditujukan untuk mengamankan kepentingan bersama kedua negara tersebut.

C. Hubungan Indonesia dengan Dua Negara Poros Utama Pasifik

Berdasarkan uraian terkait pembahasan hubungan Indonesia dengan dua negara poros utama di kawasan Pasifik, dapat dikatakan bahwa dari aspek kepentingan ekonomi, Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup kuat terhadap Tiongkok. Adapun, dari aspek kepentingan pertahanan, Indonesia dominan memanfaatkan Amerika Serikat sebagai negara kekuatan militer terbesar di dunia dan memanfaatkan kekuatan militer Tiongkok sebagai diversifikasi kemitraan militer. Isu-isu terkait kedaulatan teritorial yang menjadi pokok permasalahan Indonesia dengan Tiongkok merupakan masalah yang tidak berdampak besar terhadap hubungan diplomasi antara kedua negara tersebut. Akan tetapi, dukungan Amerika Serikat kepada Indonesia terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan mampu memperkuat citra positif yang dimanfaatkan Indonesia sebagai penyeimbangan kekuatan Tiongkok.

Atas dasar urgensi terkait kepentingan nasionalnya, Indonesia memilih menjalankan strategi politiknya dengan menggunakan pendekatan *Dynamic Equilibrium*. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Indonesia memiliki hubungan dependensi yang cukup kuat pada kedua negara tersebut, baik dari aspek ekonomi, maupun politik dan keamanan. Pendekatan terbaik untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia adalah dengan

menggandeng kedua negara besar yang tengah bersaing melalui dukungan terhadap keduanya. Di samping itu, Indonesia sebagai *rising middle power* menggunakan pendekatan ini juga ditujukan sebagai upaya penyeimbangan kekuatan strategi melalui ASEAN sehingga dapat menghindari konflik regional yang dapat disebabkan oleh persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Gagasan konsep *Dynamic Equilibrium* secara resmi telah diterapkan sejak tahun 2011 yang dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa (Poling, 2013). Konsep tersebut melahirkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif, dalam artian tidak adanya keberpihakan terhadap salah satu negara. Asumsi yang mendasari lahirnya Doktrin Natalegawa (nama lain konsep *Dynamic Equilibrium*) adalah kekhawatiran terhadap agresivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Akan tetapi, melihat alur perkembangan konflik Amerika Serikat dan Tiongkok yang kian memanas di kawasan Pasifik, penggunaan konsep ini menjadi hal yang masih terbukti relevan sampai saat ini dengan harapan dapat meningkatkan kekuatan Indonesia di mata dunia.

Kesimpulan

Pola persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Pasifik mencerminkan hubungan negara yang bersifat kooperasi. Indonesia, sebagai salah satu negara *middle power* di kawasan Asia Pasifik menjadikan hubungan rivalitas tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan kepentingan nasionalnya. Alih-alih mengatasi ketegangan regional yang meningkat secara langsung, Indonesia memilih menggunakan pendekatan *Dynamic Equilibrium* yang diwujudkan melalui politik luar negeri bebas dan aktif. Pendekatan ini dilakukan dengan meningkatkan kemitraan strategis bersama dengan dua negara berkekuatan besar.

Berdasarkan uraian dan data-data yang telah disampaikan, artikel ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara tujuan strategis bagi Amerika Serikat

dan Tiongkok dalam menanamkan pengaruhnya. Kebutuhan domestik Indonesia menjadi pengikat hubungan dependensi di antara Indonesia dengan dua negara *great power* yang memanfaatkan hal tersebut sebagai pengembangan kekuatan politik dan keamanan, maupun ekonomi sebagai upaya perimbangan kekuatan di kawasan Asia Pasifik.

Daftar Pustaka

- Andika, M. T., & Aisyah, A. N. (2017). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? *Indonesian Perspective*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.14710/ip.v2i2.18477> .
- Asia Green Real Estate. *The Belt and Road Initiative and the Rising Importance of China's Western*. <https://www.asiagreen.com/en/news-insights/the-belt-and-road-initiative-and-the-rising-importance-of-china-s-western-cities> (Diakses 29 Februari 2020)
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. "Peringkat Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara Tahun 2010 s.d. Tahun 2019." *National Single Window for Investment*. https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik (Diakses 01 Mei 2020)
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. "Peringkat Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Tahun 2010 s.d. Tahun 2019." *National Single Window for Investment*. https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik (Diakses 01 Mei 2020)
- Bakry, U. S. (2017). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). California: SAGE Publications.
- Codevilla, A., & Seabury, P. (2006). *War: Ends and Means*. New York: Potomac Books.
- Friana, H. (2018). *Saat Ekonomi Cina Jadi Biang Kerok Defisit Perdagangan Indonesia*. <https://tirto.id/saat-ekonomi-cina-jadi-biang-kerok-defisit-perdagangan-indonesia-dca8> (Diakses 01 Mei 2020)

- Gill, B., Goh, E., & Huang, C.-H. (2016). *The Dynamics of US-China-Southeast Asia Relations*. Sydney: The United States Studies Center at the University of Sydney.
- Goh, E. (2008). Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia Analyzing Regional Security Strategies. *International Security*, 32(3), 113–157.
- Goldstein, J. S., & Pevehouse, J. C. (2014). *International Relations*. Boston, Columbus, Indianapolis, et.al: Pearson.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamilton-Hart, N., & McRae, D. (2015). Indonesia : Balancing the United States and China, Aiming for Independence. *United States Studies Centre at the University of Sydney*, (November), 1–35.
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2015). *Kerjasama AS-Indonesia di Bidang Maritim*. <https://id.usembassy.gov/id/kerjasama-as-indonesia-di-bidang-maritim/> (Diakses 24 April 2020)
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Neraca Perdagangan dengan Mitra Dagang." *Portal Statistik Perdagangan*. <http://statistik.kemendag.go.id/balance-of-trade-with-trade-partner-country> (Diakses 01 Mei 2020)
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Perkembangan Ekspor NonMigas (Negara Tujuan)." *Portal Statistik Perdagangan*. <http://statistik.kemendag.go.id/growth-of-non-oil-and-gas-export-destination-country> (Diakses 01 Mei 2020)
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Perkembangan Impor NonMigas (Negara Asal)." *Portal Statistik Perdagangan*. <http://statistik.kemendag.go.id/growth-of-non-oil-and-gas-import-origins-country> (Diakses 01 Mei 2020)
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2010). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Ke Amerika Serikat, Menhan*

- Tingkatkan Kerjasama Pertahanan.* <https://www.kemhan.go.id/2015/10/08/ke-amerika-serikat-menhan-tingkatkan-kerjasama-pertahanan-2.html> (Diakses 24 April 2020)
- Murphy, A. M. (2010). US Rapprochement with Indonesia: From Problem State to Partner. *Contemporary Southeast Asia*, 32(3), 362. <https://doi.org/10.1355/cs32-3c>
- Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*, 2(3), 246–266. <https://doi.org/10.1017/S0260210500116729>
- Odgaard, L. (2007). *The Balance of Power in Asia-Pacific Security: US-China Policies on Regional Order*. London and New York: Routledge.
- Poling, G. B. (2013). *Dynamic Equilibrium: Indonesia's Blueprint for a 21st Century Asia Pacific.* <https://www.csis.org/analysis/dynamic-equilibrium-indonesia%E2%80%99s-blueprint-21st-century-asia-pacific> (Diakses 23 April 2020)
- Sundararaman, S. (2018). India-ASEAN Relations: ‘Acting’ East in the Asia Pacific. *International Studies*, 54(1–4), 62–81. <https://doi.org/10.1177/0020881718787575>
- U.S. Department of State. (2020). *U.S. Relations with Indonesia.* <https://www.state.gov/u-s-relations-with-indonesia/> (Diakses 24 April 2020)
- Vaughn, B. (2011). Indonesia: Domestic politics, Strategic Dynamics, and American Interests. *Asian Economic and Political Issues*, 1–38.